

P R A K A R S A *Policy Brief*

November 2023

Meninjau Kebijakan Keberlanjutan Bank di Indonesia: Sudahkah Cukup Serious?



Pesan Kunci:

- Indonesia telah banyak mencapai kemajuan dalam regulasi keuangan berkelanjutan, namun masih terdapat gap antara regulasi dengan praktik di lapangan.
- Beberapa bank menunjukan kemajuan kebijakan keberlanjutan tetapi masih lambat dan perlu akselerasi untuk menguatkan peran bank dalam menangani krisis iklim dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- OJK perlu mendorong iklim pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan melalui kebijakan dan praktik baik yang dilakukan oleh bank.

Kemajuan keuangan berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda utama bagi negara-negara di dunia. Agenda pembangunan ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Komitmen negara-negara di dunia terkait perubahan iklim tertuang dalam ratifikasi Perjanjian Paris pada 2015 dan dituangkan dalam bentuk *Nationally Determined Contribution* (NDC) di tingkat negara.

Indonesia berkomitmen untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk memenuhi target tersebut, Indonesia diperkirakan membutuhkan pembiayaan sebesar USD322,9 miliar untuk implementasi aksi mitigasi, belum termasuk biaya aksi adaptasi dan penciptaan lingkungan pendukung (BKF, 2022). Pembiayaan tentu saja tidak bisa hanya bersumber dari APBN, diperlukan keterlibatan multi pihak termasuk lembaga keuangan.

Pada lingkup global, regulator keuangan dan bank sentral semakin menyadari pentingnya implementasi keuangan berkelanjutan termasuk pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kebijakan penyaluran kredit dari perbankan. Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang ikut mendorong lahirnya industri keuangan yang lebih berkelanjutan dan berkomitmen terhadap implementasi prinsip LST. Namun, bagaimana kemajuan komitmen bank dalam mendukung penanganan krisis iklim dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia?

Pemeringkatan kebijakan bank: menilai kinerja keberlanjutan perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan. Kebijakan tersebut antara lain POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, panduan teknis POJK 51 di mana OJK menetapkan 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KUBL), POJK 60/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Roadmap keuangan berkelanjutan tahap I dan II, buku Acuan Kredit/ Pembiayaan Perkebunan dan Industri Sawit, First Movers on Sustainable Banking dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia/IKBI, serta Taksonomi Hijau Indonesia 1.0.

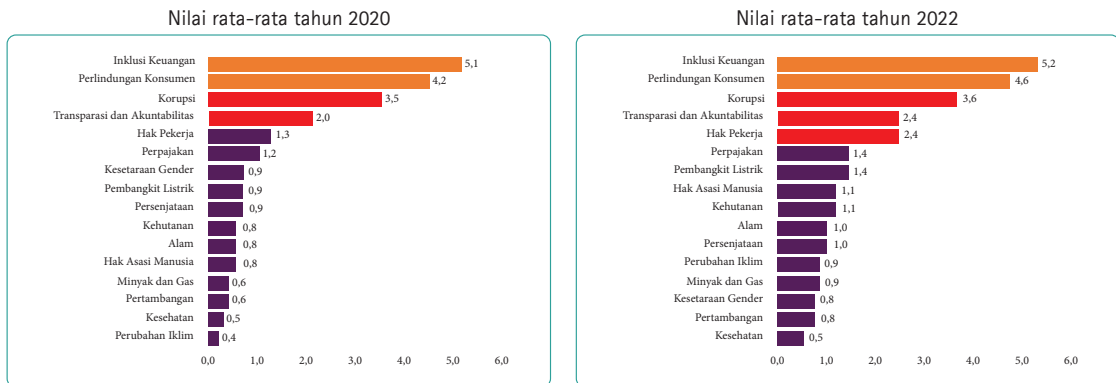
Implementasi keuangan berkelanjutan juga diperkuat dengan adanya kewajiban perbankan mengembangkan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan laporan berkelanjutan. Namun berdasarkan dokumen pelaporan taksonomi hijau, dari seluruh kredit atau pembiayaan yang telah diklasifikasikan oleh bank, penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor ekonomi hijau memiliki total baki debit yang relatif masih rendah yakni sebesar 28% (Rp294,20 triliun) dibandingkan dengan sektor kuning 37% (Rp392,87 triliun) dan merah 35% (Rp 378,16 triliun) dari total Rp1.065,23 triliun yang telah teridentifikasi klasifikasinya (OJK, 2023).

Perkembangan kebijakan dan komitmen perbankan di Indonesia dalam implementasi keuangan berkelanjutan perlu diketahui untuk memantau produk dan layanan berlabel berkelanjutan benar-benar diaplikasikan dan bukan *greenwashing* ResponsiBank Indonesia dalam PRAKARSA (2022) melakukan penilaian terhadap 11 bank di Indonesia pada 16 tema. Pada setiap tema, penilaian dilakukan

berdasarkan elemen yang terkait kebijakan internal operasional perbankan maupun kebijakan pembiayaan dan investasi. Skor masing-masing bank didasarkan pada proporsi elemen yang terdapat dalam kebijakan dengan

rentang nilai 0 - 10. Pemberian skor dilakukan apabila terdapat kebijakan bank yang memenuhi kriteria elemen yang dinilai.

Grifik 1. Nilai rata-rata bank berdasarkan tema tahun 2020 dan 2022



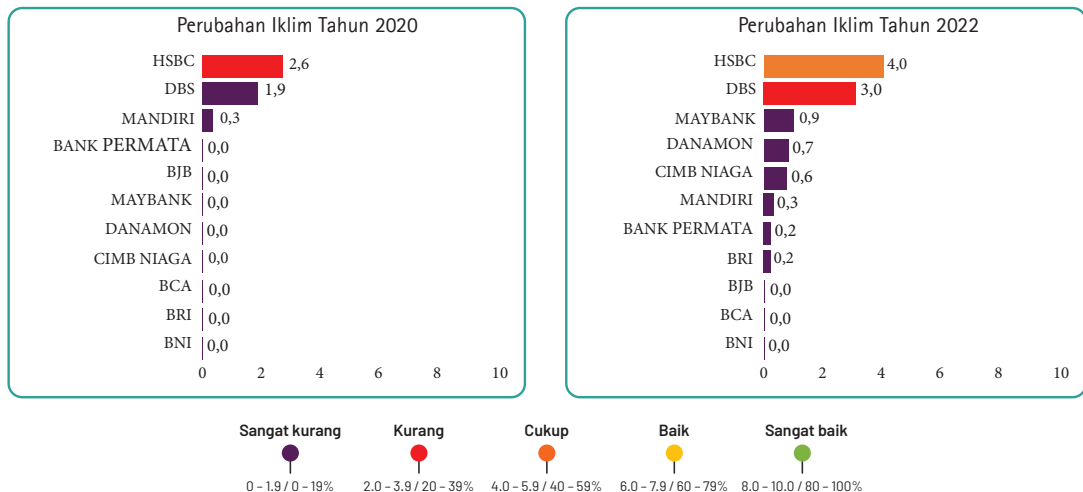
Sumber: PRAKARSA, 2022

Tema inklusi keuangan merupakan tema yang mendapatkan rata-rata nilai paling tinggi diikuti tema perlindungan konsumen. Sedangkan tema kesehatan, pertambangan dan kesetaraan gender adalah yang paling rendah pada tahun 2022. Kemudian untuk tema perubahan iklim sudah mengalami perubahan di mana bank sudah mulai memiliki komitmen dalam mengurangi dampak iklim baik dalam operasionalnya maupun pembiayaan yang dilakukannya meskipun masih rendah.

Beberapa bank mulai berkomitmen dalam mengatasi perubahan iklim

Komitmen bank dalam mengatasi perubahan iklim sudah mulai ada namun baru terbatas pada beberapa bank. Hanya HSBC dan DBS telah melakukan implementasi terhadap IFC *Performance Standards* dan masuk dalam keanggotaan *Equator Principles*. Sedangkan, bank lainnya yang dinilai belum meratifikasi kebijakan ini dan masih sedikit bank yang memiliki daftar bisnis yang tidak diberikan dukungan finansial (daftar pengecualian) seperti bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim.

Grifik 2. Rata-rata nilai pada tema perubahan iklim tahun 2020 dan 2022



Sumber: PRAKARSA, 2022

Bank di Indonesia sudah ada yang memiliki kebijakan yang mendukung keberlanjutan melalui kebijakan sektoral mereka. BRI (2021) memiliki kebijakan pengelolaan risiko LST di sektor kelapa sawit, dimana perusahaan melakukan penilaian lengkap terkait dengan kebutuhan sumber daya air dan dampak pelepasan air dengan mempertimbangkan kebutuhan air tanah untuk tanaman, kondisi hidrologi, serta penerapan LST di bidang ketenagakerjaan, anti diskriminasi, dan kesetaraan gender. Maybank (2021) berkomitmen untuk menerapkan LST melalui pemutusan aliran pembiayaan kepada bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip LST salah

satunya seperti kebijakan 'no deforestation' terutama di enam industri, yaitu kelapa sawit, kehutanan dan penebangan, konstruksi dan *real estate*, ketenagalistrikan, minyak dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Perbankan mulai mengurangi aliran pembiayaan pada sektor-sektor yang rentan merusak lingkungan dan menimbulkan kekerasan. Ditemukan pada BRI (2021) yang tidak memberikan pinjaman kepada usaha-usaha yang merusak lingkungan, tidak mendukung pembiayaan untuk pengadaan tanah melalui kekerasan, hingga tidak

membayai kegiatan atau sektor bisnis yang dapat merusak Situs Warisan Dunia UNESCO. HSBC (2021) memiliki kebijakan penghapusan batu bara sebagai pembangkit listrik, namun belum mencakup kebijakan pembangkit listrik minyak dan gas. HSBC memiliki komitmen untuk mengurangi pembiayaan batu bara secara bertahap dengan persentase 25% di tahun 2025, dan 50% di tahun 2030. HSBC telah memiliki kebijakan risiko berkelanjutan dengan tidak memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang melanggar hak-hak masyarakat lokal. Komitmen serupa juga diimplementasikan oleh DBS (2021) secara aktif terlibat dalam penghentian pembiayaan batu bara untuk penambangan ataupun pembangkit listrik dengan ambang batas tertinggi lebih dari 50% sejak tahun 2019.

Masih sedikit bank yang telah meningkatkan aliran pembiayaannya pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). HSBC (2021) berkomitmen untuk mendukung mekanisme transisi energi melalui kemitraan publik-swasta yang dipimpin oleh Bank Pembangunan Asia dengan mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara, serta meningkatkan investasi pada energi terbarukan. DBS berusaha meningkatkan komitmennya melalui bantuan pembiayaan bagi perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan dan bersih yang mendekati SGD 1,1 miliar. Di tahun 2021, DBS juga telah meningkatkan komitmennya melalui pembiayaan sebesar SGD 50 miliar di tahun 2024 menuju keuangan berkelanjutan yang meliputi pinjaman hijau, pinjaman transisi, pinjaman terkait keberlanjutan, serta pembiayaan terbarukan (DBS, 2021). Maybank (2021) juga menyediakan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dengan listrik dan daya hybrid, serta pembelian obligasi yang disesuaikan dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Secara khusus, Maybank memiliki Rencana Aksi Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari pemberian kredit kepada pelanggan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dan pendukungnya. Di samping itu, Maybank juga memiliki daftar hitam terkait dengan kegiatan produksi atau perdagangan bahan radioaktif, termasuk pembangkit tenaga nuklir dan layanan terkait.

Mayoritas bank belum memiliki komitmen yang kuat terkait pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan gender

Komitmen bank terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan anti diskriminasi masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hanya HSBC dan BCA yang sudah menunjukkan komitmen untuk mematuhi HAM melalui implementasi *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs). Dari segi penerapan kebijakan anti diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan, hanya CIMB Niaga dan HSBC yang dinilai memiliki komitmen dalam penerapan prinsip tersebut. Dalam laporan tahunan 2021, CIMB Niaga telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, jenis kelamin, hingga faktor diskriminatif lainnya. Sedangkan HSBC telah mengadopsi standar internasional terkait dengan pengakuan terhadap HAM, seperti *Equator Principles*, *IFC Performance Standard*, *UN Global Compact*, serta *UN Principles for Responsible Investment*. Selain bank-bank ini, beberapa bank dalam pemeriksaan tahun 2022 ini (BNI,

Mandiri, Danamon, BJB dan Permata Bank) belum memiliki kebijakan terkait kepatuhan terhadap prinsip HAM.

Bank masih belum mengedepankan kebijakan terkait dengan pembiayaan perusahaan yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan hak-hak pekerja, termasuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Pada tema hak pekerja, 7 dari 11 bank memiliki kebijakan untuk mematuhi Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Akan tetapi, komitmen terkait dengan pembiayaan perusahaan yang menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja, serta larangan tindakan diskriminasi hanya diimplementasikan oleh BRI, CIMB Niaga, DBS, serta HSBC.

Komitmen terkait dengan pelarangan pembiayaan bagi perusahaan pelaku kerja paksa dan pekerja anak telah diimplementasikan oleh lebih dari setengah bank yang dinilai, tetapi belum ditemukan pada Bank Danamon, Permata Bank, dan BJB. Dalam aspek kesehatan dan keselamatan pekerja, HSBC dan DBS telah berkomitmen menerapkan *Equator Principles* dan *IFC Performance Standard* dan BRI berkomitmen dalam membiayai perusahaan yang memiliki SOP terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja di sektor kelapa sawit, meskipun penerapan kebijakan ini masih belum secara merata ditetapkan pada seluruh sektor.

Regulasi terkait dengan kebijakan kesetaraan gender dalam pemberian investasi atau kredit perusahaan masih belum diimplementasikan oleh mayoritas perbankan, meskipun dalam urusan internalnya telah mengatur kebijakan terkait kesetaraan gender. Sebagai contoh, kebijakan internal HSBC yang memiliki komitmen dalam menerapkan kesetaraan pembayaran gaji antara laki-laki dan perempuan. Jajaran direksi perempuan HSBC telah mencapai 38% di tahun 2021 dan menargetkan untuk mencapai 40% di tahun 2023. Komitmen HSBC terkait dengan kesetaraan gender juga diinterpretasikan dalam kebijakan pelatihan dan pembinaan kepemimpinan yang ditujukan secara khusus untuk pekerja perempuan. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ini masih belum diimplementasikan oleh bank lainnya.

Mayoritas bank belum memprioritaskan penguatan tata kelola, terutama terkait dengan mekanisme pengaduan dan transparansi informasi pembiayaan

Hanya tiga bank telah berkomitmen dalam mengungkapkan informasi tata kelolanya yakni CIMB Niaga, Danamon dan HSBC. CIMB Niaga (2021) menetapkan kebijakan terkait dengan keterbukaan informasi dalam mengungkapkan nama-nama perusahaan yang didanai, jumlah perusahaan yang telah dilibatkan dalam diskusi sosial dan lingkungan, serta adanya mekanisme pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik (e-voting). Selain itu, CIMB Niaga juga memiliki layanan pengaduan atau *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikelola secara independen oleh pihak ketiga, sekaligus menjamin anonimitas dari pelapor. Dalam implementasinya, CIMB Niaga telah menerima 133 laporan melalui WBS dengan persentase penyelesaian investigasi masalah sebesar 27% atau setara dengan 36 laporan di tahun 2021.

Dari sisi tata kelola, Danamon (2021) juga memiliki mekanisme pengaduan publik yang termasuk dalam

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan
The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh:

- Eka Afrina Djamhari
- Eksanti Amalia K.W
- Dwi Rahayu Ningrum

Diulas oleh:

Victoria Fanggalda

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

pengungkapan jumlah, jenis, serta persentase pengaduan masyarakat. Nama-nama pihak perusahaan atau pemerintah yang didanai oleh Danamon juga diungkapkan secara rinci, termasuk sektor ekonomi, wilayah geografis, serta pinjaman sindikasi. HSBC (2021) berkomitmen memberikan peningkatan pengetahuan dan penerbitan laporan keberlanjutan yang mencakup topik LST yang disesuaikan dengan standar *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*.

Dari segi tata kelola, bank belum secara terbuka memberikan informasi terkait kredit ataupun pendanaan perusahaan di situs web mereka, penerbitan perincian portofolio dalam tabel silang dengan melakukan penggabungan data industri dan wilayah, serta penerbitan nama-nama perusahaan yang tercantum dalam *blacklist* pasar modal akibat masalah keberlanjutan. Dalam hal ini, sebagai contoh meskipun Maybank telah mengintegrasikan LST secara eksplisit ke dalam kebijakan investasi dan pelaporan namun belum menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan. Maybank masih belum menyediakan kebijakan mekanisme pengaduan, keterbukaan informasi pembiayaan dan investasi, serta informasi lainnya seperti portofolio pembiayaan secara komprehensif.

Rekomendasi kebijakan

Berdasarkan hasil penilaian perbankan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan:

1. Bank perlu meningkatkan komitmen pada beberapa tema dan sektor yang masih mendapatkan penilaian rendah, seperti tema kesehatan, kesetaraan gender, pertambangan, perubahan iklim, serta gas dan minyak bumi.
2. Bank perlu memiliki kebijakan tertulis dan secara eksplisit terkait komitmen pembiayaan yang dilakukan seperti penetapan kriteria dan *safeguarding* pinjaman untuk sektor berisiko tinggi, seperti pertambangan, proyek energi skala besar, dan perkebunan skala besar.
3. Bank dapat mengacu pada kriteria keberlanjutan yang dikembangkan berbagai standar internasional yang sudah ada sebagai dasar pembuatan kebijakan dan dituliskan secara eksplisit.
4. OJK perlu mendorong iklim pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan melalui kebijakan dan praktik baik yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Pengembangan kebijakan pembiayaan berkelanjutan dapat mengacu pada standar internasional.
5. OJK dapat mengakselerasi implementasi keuangan berkelanjutan dan pembiayaan hijau dengan menerapkan taksonomi hijau secara *mandatory*. OJK juga perlu mengembangkan skema insentif dan disinsentif untuk menarik perbankan dan untuk memastikan implemetasi taksonomi hijau perlu adanya gugus tugas yang melibatkan multipihak termasuk CSO dan pihak swasta.

Referensi

- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Pendanaan Perubahan Iklim Indonesia. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pendanaan-perubahan-iklim-indonesia-237a86cc/detail/>
- BNI. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-TB-2021-IND-v2.pdf>
- BRI. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://bri.co.id/documents/20123/56786/SR%202021%20Bank%20BRI%20-%20IND.pdf>
- BRI. (2021). Laporan Tahunan 2021. <http://https://www.ir-bri.com/misc/AR/Final-AR-BRI-2021-English-Version-R.pdf>
- Cimb Niaga. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/AR/AR-2021-EN.pdf>
- Cimb Niaga. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/SR/SR2021-EN.pdf>
- Danamon. (2021). Laporan Tahunan Danamon 2021. [https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN-LAPORAN-TAHUNAN/2021/ID-Ver/Laporan-Tahunan-Danamon-2021---ID_Rev.pdf](https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-TAHUNAN/2021/ID-Ver/Laporan-Tahunan-Danamon-2021---ID_Rev.pdf)
- Danamon. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-KEBERLANJUTAN/Laporan-Keberlanjutan-2021-PT-Bank-Danamon-Indonesia.pdf>
- DBS. (2021). Laporan Tahunan Bank DBS Indonesia 2021. <https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/id/AR%20DBS%20Indonesia%202021.pdf>
- DBS. (2021). Laporan Tahunan Holding DBS 2021. <https://www.dbs.com/annualreports/2021/files/media/dbs-annual-report-2021.pdf>
- DBS. (2021). Laporan Keberlanjutan Holding DBS 2021. https://www.dbs.com/iwov-resources/images/sustainability/reporting/pdf/web/DBS_SR2021.pdf?pid=sg-group-pweb-sustainability-pdf-dbs-sustainability-report-2021
- DBS. (2021). Accelerating our net zero commitment: A responsible, pragmatic and impactful approach. <https://www.dbs.id/corporate/sustainability/our-path-to-net-zero>
- HSBC Indonesia. (2021). Annual report 2021. <https://www.about.hsbc.co.id/-/media/indonesia/en/hsbc-in-indonesia/financial-and-regulatory-reports/220613-pt-bank-hsbc-indonesia-annual-report-2021-en.pdf>
- Maybank. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Laporan-Tahunan/Annual-Report-Maybank-Indonesia-2021.pdf>
- Maybank. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Sustainability-Reports/Sustainability-Report-Maybank-Indonesia-2021.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Overview Taksonomi Hijau Indonesia dan Implementasinya dalam Pilot Project Pelaporan Bank. https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/BE/uploads/sfilibrary/files/file_f19a5861-a941-4bfo-b318-4191b6140f74-1808202122115.pdf
- PRAKARSA. (2022). Laporan Pemeringkatan Bank 2022: Mengukur Kemajuan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia.